

Satu Kalurahan Tak Ajukan Dana BKK

SLEMAN (KR) - Dana Bantuan Khusus Keuangan (BKK) kalurahan tahun 2020 sebesar Rp 34 miliar untuk 85 kalurahan tersebar di 17 kapanewon (kecamatan). Sedangkan yang tak mengajukan dana BKK ada satu kalurahan di wilayah Kapanewon Godean.

Kabid Administrasi Keuangan dan Aset Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman Alkhalik menjelaskan, Pemkab Sleman telah menganggarkan Rp 34 miliar untuk dana BKK. Dana tersebut sesuai dengan proposal yang diajukan oleh masing-masing kalurahan. "Jadi masing-masing kalurahan mengajukan proposal ke Pemkab Sleman untuk mendapatkan dana BKK. Sehingga dana yang diterima setiap kalurahan berbeda-beda," jelasnya kepada *KR*, Selasa (22/9).

Menurut Alkhalik, dana BKK sudah mulai cair Juni 2020 ke-

marin untuk tahap pertama. Namun dana tersebut hanya untuk 85 kalurahan yang tersebar di 17 kapanewon Kabupaten Sleman. Sedangkan ada satu kalurahan di Kapanewon Godean tidak mengajukan proposal BKK. "Sampai batas waktu yang ditentukan, kalurahan itu tidak mengajukan (proposal). Padahal sebelumnya semua kalurahan sudah kami imbau untuk mengajukan proposal," terangnya.

Ditambahkan, untuk pencairan dana BKK tahap pertama yaitu surat permohonan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan. Sedangkan pencairan tahap kedua yang dimulai sejak Juli kemarin, kalurahan harus melaporkan penggunaan dana BKK tahap pertama. "Untuk tahap pertama, 85 kalurahan sudah cair dana BKK-nya. Tapi untuk tahap kedua, baru sebagian yang mengajukan," ujarnya. (Sni)-f

KPU HARUS OPTIMALKAN PELAYANAN PENDAFTARAN PEMILIH Bawaslu Temukan 26.330 Pemilih Potensial

SLEMAN (KR) - Dari hasil pencermatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sleman, masih terdapat sekitar 26.330 pemilih potensial didaftar sebagai pemilih. Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman mengoptimalkan posko pelayanan pendaftaran pemilih selama proses pengumuman dan tanggapan masyarakat serta perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman M Abdul Karim Mustofa menerangkan, angka 26.330 ini didapatkan dari pengurangan antara jumlah pengguna hak pilih pada Pemilu 2019. Kemudian ditambahkan penduduk masuk dan pemilih pemula dikurangi penjumlahan penduduk keluar wilayah Sleman dan meninggal dunia medio 18 April 2019 hingga 13 Agustus 2020 yang tercatat sebanyak 841.934 jiwa. "Bila angka 841.934 dikurangi DPS 794.839 pemilih, maka didapatlah angka 26.330 pemilih potensial itu. Adapun angka data penduduk masuk, pemilih pemula, penduduk keluar, dan penduduk meninggal dunia medio 18 April 2019 hingga 13 Agustus 2020 itu," jelas Karim, Selasa

(22/9).

Karim mengaku, jumlah ini adalah angka resmi yang didaftarkan Bawaslu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Sleman. Kalau dibandingkan dengan jumlah DPS Pemilihan Bupati Sleman yang telah disahkan pada 11 September 2020 lalu, perlu upaya dari KPU Kabupaten Sleman dalam menjangkau pemilih-pemilih potensial tersebut.

"Salah satu upaya yang dapat ditempuh KPU adalah dengan mengoptimalkan posko pelayanan pendaftaran pemilih. Hal ini juga sudah kami sampaikan pada saat pleno rekapitulasi penetapan DPS Pemilihan Bupati Sleman beberapa waktu lalu," terang Karim. Koordinator Divisi Hukum

Bawaslu Sleman Arjuna Al Ihsan Siregar menambahkan, angka pemilih yang dicoret atau dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU Sleman berdasarkan hasil cokolit kemarin memang cukup tinggi yakni sebanyak 61.143 pemilih dari total pemilih A.KWK sebanyak 834.318 pemilih. Dalam waktu dekat, Bawaslu akan turut mengawasi dan mencermati DPS yang telah diumumkan KPU. Termasuk, mencermati data pemilih ganda dan pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat karena tidak lagi berdomisili di wilayah Sleman atau telah meninggal dunia. "Saat ini kami masih menunggu salinan DPS dari KPU, karena sudah memasuki hari keenam pascapleno kemarin, kami belum menerima salinannya," ungkapnya. (Aha)-f

SUNTIKAN MODAL RP 2,4 JUTA DARI PEMERINTAH Dinkop UKM Usulkan 103.500 Pelaku Usaha

SLEMAN (KR)- Dinas Koperasi dan UKM Sleman mengusulkan sekitar 103.500 pelaku usaha yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp 2,4 juta. Usulan tersebut akan diseleksi oleh dua bank yang telah ditunjuk pemerintah. Harapannya dengan bantuan ini, pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 bisa menggunakannya untuk memperkuat modal usahanya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sleman Pustopo mengatakan, bantuan tunai ini menjadi salah satu langkah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diambil pemerintah untuk membantu para pelaku usaha dan industri kecil menghadapi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Dinas Koperasi dan UKM Sleman telah mengusulkan ke pusat sebanyak 103.500 pelaku UMKM. "Info terbaru, pelaku UMKM dari Sleman yang sudah lolos seleksi awal sekitar 30.000-an pelaku UMKM," ujarnya kepada *KR* di ruang kerjanya, Selasa (22/9).

Menurut Pustopo, dalam penyaluran bantuan ini, pihaknya hanya sebatas mengusulkan ke pemerintah pusat. Kemudian diseleksi, apakah pelaku UMKM belum pernah mendapat bantuan atau mendapat kredit atau pinjaman dari perbankan. "Pelaku UMKM yang mendapat bantuan ini syaratnya bahwa dia usaha mikro kecil. Saat ini dari dua bank yang ditunjuk pemerintah BNI dan BRI, sudah ada sekitar 9.000 pelaku UMKM yang sudah dapat," terangnya.

Pelaku UMKM yang diusulkan, lanjut Pustopo, melalui proses seleksi pemerintah di bawah. Baik dukuh, lurah hingga kecamatan melakukan seleksi dan menda. Syarat lain untuk bisa mengakses bantuan ini yakni pelaku UMKM tidak boleh memiliki tabungan di bank lebih dari Rp 2 juta. "Untuk tahapan pencairan nanti ditransfer ke nomor rekening mereka. Para pelaku UMKM wajib membuat rekening baru yang khusus untuk itu (pencairan bantuan)," tambahnya. (Aha)-f

TMMD Sengkuyung Penyuluhan Covid-19

SLEMAN (KR) - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap III Tahun 2020 telah dibuka kembali. Penyerahan program TMMD dilakukan Bupati Sri Purnomo kepada Dansatgas TMMD Sengkuyung Tahap III Tahun 2020 di Aula Lantai III Setda Sleman, Selasa (22/9).

Bupati menyambut baik dengan dibukanya kembali program tersebut. Program TMMD ini telah terbukti mampu menggerakkan pembangunan infrastruktur di desa, sehingga dapat membantu roda perekonomian masyarakat. Program ini dapat mawadahi aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah pedesaan,



Bupati menyerahkan program TMMD.

mengingat proses perencanaannya selalu diawali dengan melibatkan berbagai instansi dan masyarakat, serta disusun dengan sistem *bottom up planning*. Sementara Komandan

Kodim (Dandim) 0732/Sleman Letkol Inf Arief Wicaksana, menjelaskan, kegiatan ini akan menyasar pada pembangunan fisik dan nonfisik. Pembangunan fisik, terdiri dari pembangunan talut

sepanjang 700 meter, pembangunan badan jalan sepanjang 700 meter dengan lebar 3 meter, rehab atap masjid, rehab lantai 2 rumah seluas 24 meter persegi dan pembuatan pos Kamling 3 x 3,5 meter. "Untuk nonfisik meliputi penyuluhan wawasan kebangsaan dan bela Negara, penyuluhan Kamtibmas dan NAPZA, penyuluhan pertanian, penyuluhan KB dan kesehatan, serta penyuluhan penanggulangan Covid-19. Semua kegiatan ini akan memakai dana yang bersumber dari APBD DIY sebanyak Rp 75 juta dan dari APBD Sleman Rp 200 juta, dilaksanakan selama 30 hari ke depan," jelas Dandim. (Has)-f

GALERI JASMINE NOLOGATEN

Sarana Menampung Produk KWT

ADANYA pandemi Covid-19 ini membuat pendapatan ibu rumah tangga yang punya usaha kecil-kecilan sedikit meredup. Untuk membangkitkan semangat ibu-ibu dalam berkarya, Padukuhan Nologaten membuka sebuah galeri yang bertujuan menampung produk ibu-ibu rumah tangga.



Dukuh Nologaten mendampingi Tazbir saat melihat pasar tiban.

Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Jasmine Nologaten Wahyu Hanani mengatakan, sebelum ada pandemi Covid-19, ibu-ibu di Nologaten sudah banyak yang berkecimpung di dunia usaha. Namun setelah ada Covid-19, omzet mereka jadi menurun. Dengan dibukanya Galeri Jasmine Nologaten ini bisa menampung produksi dari ibu-ibu. Tidak hanya dipromosikan secara online tapi juga punya toko offline.

"Semua produk yang dipajang merupakan karya ibu-ibu. Ada rajutan dan sulaman yang dibuat oleh ibu-ibu lansia. Kami dibantu mahasiswa KKN untuk mempromosikan di media sosial," terang Wahyu yang juga Bu Dukuh Nologaten saat ditemui di Galeri Jasmine Nologaten di Dukuh Nologaten RT 7 RW 2 Caturtunggal Depok Sleman.

Selain meluncurkan Galeri Jasmine Nologaten, diadakan pula Pasar Tiban yang diikuti oleh warga Nologaten. Pasar Tiban ini diadakan setiap Minggu. Wahyu mengungkapkan, sebelum membuka Galeri Jasmine, para ibu rumah tangga sudah diberi pelatihan. Sehingga jika ada lonjannya permintaan, harapannya mereka sudah siap. "Saat pandemi kan mereka sepi or-

deran. Harapannya ada orderan lagi yang masuk," tandas Wahyu.

Saat peluncuran Galeri Jasmine Nologaten, turut hadir mantan Kepala Dinas Pariwisata Tazbir yang berpesan agar produk makanan di Galeri Jasmine bisa dilengkapi dengan izin PIRT, menjaga kualitas kemasan dan kualitas dari makanan itu sendiri. "Dalam Pasar Tiban, ada juga yang menjual tanaman karena saat ini tanaman juga se-

dang diminati pasar. Ada juga produk dari olahan sampah berupa botol dan kertas kalender," kata Wahyu.

Ketua KKN UMY Arbi Seta Bagaskara menambahkan, kegiatan yang dilakukan bersama ibu-ibu KWT Jasmine ini sesuai dengan tema yang diberikan pihak kampus agar terlibat dalam pengembangan UMKM masa pandemi Covid-19. Pasalnya sektor UMKM sangat terpengaruh selama pandemi. (Aha)-f

MBS 92.70 FM
Radio Dangdutnya Jogja

Kethoprak Mataram

SETIAP SELASA - RABU - KAMIS
JAM 21.00 WIB

JL. TEGALGENDU NO. 12 KOTAGEDE YOGYAKARTA
TELP. (0274) 419956

REQUEST: TELP. (0274) 376470, SMS/WA 0817272800
MBS FM Dangdutnya Jogja @mbsfm_jogja @RadioMBSFMJogja

KORAN
MERAPI
TUNTAS TANPA TENDENSI

KHUSUS PROMO PRODUK

30 RIBU DAPAT DISPLAY 2 KALI
ukuran 82 mm x 30 mm di hal iklan larik

MAU ?

Informasi lebih lanjut hubungi :

0815 7545 0801
0817 541 7297
0813 2914 3485

*) Syarat & ketentuan berlaku